PENGARUH KEPEMILIKAN NPWP DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK

(Study Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Sumedang Periode 2013-2015)

Oleh
TRINANDA SIMANGUNSONG
Program Studi Akuntansi,Fkultas Ekonomi
Universitas Komputer Indonesia
Email:trinanda1303@gmail.com

ABSTRACK

Many taxpayers who don't have NPWP, and difficulty track of the existence of taxpayers who do not yet have NPWP result in to influential tax revenues. And many taxpayer have tax debt and don't want to pay the tax debt is also one of the factors the decline in tax revenue. As a result not terealisasinya tax revenue each year. This study aims to provide empirical evidence about the effect of Ownership NPWP and Tax Collection to Tax Revenue

The population in this research is the Report development of master files and Report progress accounts receivable and module acceptance of state (MPN) in KPP sumedang for 3 years (2013-2015). The selection of the samples was done using a sampling of saturated with criteria. The total sample of 3 report in KPP sumedang for 3 years (2013-2015). The analysis used is multiple linear regression analysis.

The results of hypothesis testing in this study indicate that (1) the risk variable ownership of NPWP has a significant effect on the tax revenue (2) the variable tax collection has a significant effect on the tax revenue

Keywords: Ownership Of NPWP, Tax Collection, Tax Revenue

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dan potensial, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan. Sebagai salah satu negara berkembang Indonesia sedang gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. (Suryadi :2006:110). Penerimaan pajak adalah penghasilan negara dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak Bea Materai, Bea perolehan tanah dan bangunan. (Siti Kurnia Rahayu :2010:45)

Dalam penerapan sistem akuntansi berkomputer, kualitas pengguna harus diselaraskan dengan sistem yang akan diterapkan. Dengan demikian, sistem tersebut dapat berjalan secara efektif sesuai dengan tujuan yang hendak akan dicapai oleh perusahaan (Lilis Puspitawati, 2013 :251).

Fungsi penerimaan pajak adalah sumber dana bagi pembiayaan berbagai proyek penanggulangan dampak krisis ekonomi, juga dapat mencegah terjadinya pembengkakan defisit anggaran. Dengan demikian, penerimaan perpajakan sekaligus dapat menunjang upaya pengendalian likuiditas ekonomi sektor swasta dan masyarakat dalam menciptakan stabilitas ekonomi, khususnya tingkat harga umum. (Suryadi :2006:111).

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak diantaranya pemerintah untuk membuat langkah-langkah kebijakan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan meningkatkan kesadaran untuk membayar pajak, petugas pajak (fiskus) yang kerja keras melakukan sosialisasi dan penagihan pajak dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak (Fouktone 2007:3)

Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada setiap wajib pajak disertai dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dan pemberian NPWP dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar. Surat tersebut menginformasikan pemenuhan kewajiban perpajakan kepada setiap wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian petugas Seksi Tata Usaha Perpajakan, kewajiban perpajakan tersebut diisi dan harus dilaksanakan oleh setiap wajib pajak. Pengisian kewajiban perpajakan harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga pelaksanaan atas kewajiban perpajakan oleh setiap wajib pajak dapat mengamankan penerimaan pajak. Semakin banyak yang diisi kewajiban perpajakan oleh wajib pajak secara benar dan tepat, penerimaan pajak meningkat (Agus Setiawan :2007:59).

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyandraan, dan menjual barang yang telah disita. (Haularosdiana dan Edi Slamet :2011:245)

Tunggakan pajak perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum dan memaksa, pengesahan Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa pada tanggal 23 Mei 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 mengenai Penagihan Pajak dengan Surat Paksa merupakan langkah antisipasi pemerintah dalam memberikan kekuatan hukum terhadap tindakan penagihan pajak dari waktu ke waktu menunjukan jumlah yang semakin besar, dengan Undang-undang penagihan pajak tersebut diharapkan dapat memberikan penekanan yang lebih terhadap keseimbangan antara kepentingan wajib pajak dan kepentingan negara (UU tahun 2000 tentang penagihan dan surat paksa).

Oleh karena itu pemerintah membuat kebijakan, yaitu suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya, kemudahan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak dalam mengurus pajak sering menemui kendala dan hambatan dan dalam praktiknya, tidak semua wajib pajak tepat menghitung pajaknya dengan benar dan bahkan tidak menyetorkan pajaknya, ada yang dengan sengaja mengurangi jumlah pajaknya namun ada juga yang tidak sengaja salah menghitung jumlah pajaknya, sehingga harus dilakukan penagihan kembali kepada wajib pajak atas tunggakan utang pajak yang harus dibayar dan perlu tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa (UU No.16 tahun 2000 tentang Ketetapan Umum Tata Cara Perpajakan).

1.2 Identifikasi Masalah

1. Masih banyaknya wajib pajak orang pribadi yang masih belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan sulitnya melacak keberadaan wajib pajak orang pribadi yang di luar karyawan karena kebanyakann dari mereka belum mempunyai NPWP.
2. Masih banyaknya wajib pajak yang tidak memenuhi/ mengindahkan Surat Tagihan Pajak sehinggah tidak tercapainya target penerimaan pajak.

1.3 Rumusan Masalah

1. Seberapa besar Pengaruh kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terhadap Penerimaan Pajak.
2. Seberapa besar Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Untuk memperoleh bukti empiris apakah kepemilikan NPWP dan penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP pratama sumedang tahun 2013-2015.

1.4.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terhadap Penerimaan Pajak.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah seperti yang telah dijelaskan dalam latar belakang serta untuk mengetahui bagaimana caranya agar tercapainya target penerimaan pajak.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Sebagai wawasan dan pengetahuan baru bagi pembaca sebagai wawasan baru dan pengetahuan baru ataupun tambahan ilmu pengetahuan dari minimal menjadi maksimal agar lebih paham khususnya dalam hal Kepemilikan NPWP, Penagihan Pajak, dan Penerimaan Pajak.

II. KAJIAN PUSTAKA,KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Kepemilikan NPWP

2.1.1.1 Pengertian kepemilikan NPWP

menurut Siti Resmi (2014:24)“ Nomor pokok wajib pajak merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak”.

2.1.1.2 Tata Cara Pendaftaran NPWP

Menurut Tansuria (2010:3) tata cara pendaftaran NPWP adalah Wajib pajak mengisi Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Formulir Permohonan Pengukuhan Penghasilan Kena Pajak (PKP) secara lengkap dan jelas serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan menyerahkannya kepada petugas pendaftaran wajib pajak. Jika permohonan ditandatangani oleh orang lain, harus memiliki surat kuasa khusus.

2.1.2 Penagihan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Penagihan Pajak

Menurut Haularosdiana dan Edi Slamet (2011:245) bahwa “Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyandraan, dan menjual barang yang telah disita”.

2.1.2.2 Dasar Penagihan Pajak

berdasarkan pasal 18 ayat 1 Undang-undang No.6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.28 tahun 2007 dasar penagihan pajak adalah sebagai berikut

1. Surat Tagihan Pajak (STP)
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
4. Surat Keputusan Pembetulan
5. Surat Keputusan Keberatan
6. Putusan Banding
7. Putusan Peninjauan Kembali
8.

2.1.3 Penerimaan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:45) definisi Penerimaan Pajak sebagai berikut:

“Pajak Negara yang terdiri dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak Bea Materai, Bea perolehan tanah dan bangunan, Penerimaan Negara yang berasal dari Migas”.

2.1.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:27) faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak sebagai berikut:

1. “Kepastian Peraturan Perundang-Undangan dalam Bidang perpajakan haruslah jelas, sederhana dan mudah dimengerti, baik oleh fiskus, maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai interpretasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri. Di sisi lain, pembayar pajak akan merasa bahwa sistem pemungutan sangat berbelit-belit dan cenderung merugikan dirinya sebagai pembayar pajak.
2. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan Undang-undang perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah dibidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu dibidang sosial dan ekonomi.

3. Sistem Administrasi Perpajakan yang tepat hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak.
4. Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak.
5. Kesadaran dan pemahaman warga Negara rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada Bangsa dan Negara, serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.
6. Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektifitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas perpajakan memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien, dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil".

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Kepemilikan NPWP (X1) terhadap Penerimaan Pajak (Y)

Menurut Agus Setiawan (2007:157) menyatakan bahwa:

"Pengesahan pemberian NPWP dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar. Surat tersebut menginformasikan pemenuhan kewajiban perpajakan setiap wajib pajak Pengisian kewajiban perpajakan harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga pelaksanaan atas kewajiban perpajakan oleh setiap wajib pajak dapat mengamankan penerimaan pajak. Semakin banyak yang diisi kewajiban perpajakan oleh petugas secara benar dan tepat maka penerimaan pajak dapat meningkat".

Menurut Bambang Brodjonegoro (2016 :79) menyatakan bahwa:

" Negara dapat mengoptimalisasi penerimaan dengan baik yaitu dengan lebih menekankan kepada masyarakat agar memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan penekanan pada wajib pajak (WP) orang pribadi".

2.2.2 Pengaruh Penagihan Pajak (X2) terhadap Penerimaan Pajak (Y)

menurut Rochmat Soemitro dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:189) menyatakan bahwa:

"Penagihan pajak yang merupakan salah satu elemen dari law enforcement (penegakan hukum) di bidang perpajakan yang dimana tujuan penagihan itu sendiri adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang tentu saja dengan kepatuhan tersebut diharapkan dapat mengamankan atau terlebih lagi dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak".

Menurut Waluyo (2009:238) menyatakan bahwa :

"Penagihan pajak berhubungan terhadap penerimaan pajak yaitu perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukan jumlah yang sangat besar, Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini belum diimbangi dan kegiatan pencairannya, namun dengan demikian secara umum penerimaan pajak di bidang perpajakan semakin meningkat terhadap tunggakan pajak maka perlu dilaksanakan penagihan".

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan penulis adalah metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif, dimana metode deskriptif merupakan suatu penulisan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang objek yang diteliti. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

3.2 Operasionalisasi Variabel

Menurut Sugiyono (2013:38) pengertian operasionalisasi variabel adalah sebagai berikut:

"Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya".

1. Variabel Bebas/*Independent Variable* (X) .

Sugiyono (2013:38) mendefenisikan variabel independen atau variabel bebas adalah sebagai berikut:

Variabel bebas merupakan variabel yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel dependen (variabel terikat).

Sesuai dengan judul yang peneliti ajukan terdapat dua variabel bebas,yaitu variabel bebas (x1) pengaruh Kepemilikan NPWP dan variabl (x2) Penagihan Pajak.

2. Variabel Dependen / *Dependent Variable* (Y)

Menurut Sugiyono (2013:38) mendefenisikan variabel dependen atau variabel terikat adalah sebagai berikut:

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah Penerimaan Pajak

3.3 Sumber Data.

Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari data perkembangan master file dan data perkembangan piutang pajak dan modul penerimaan negara yang ada di KPP Sumedang dalam periode 2013-2015.

3.4 Populasi,Sampel dan Tempat serta Waktu Penelitian

3.4.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2013:80) pengertian populasi yaitu :

"Wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan".

Berdasarkan defenisi tersebut maka populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Perkembangan Master File dan Laporan Perkembangan Piutang Pajak, serta Modul Penerimaan Negara (MPN) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Sumedang dari tahun 2013 sampai tahun 2015.

3.4.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2013:81) sampel adalah sebagai berikut:
bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Berdasarkan defenisi tersebut maka sampel dalam penelitian ini untuk variabel kepemilikan NPWP adalah jumlah wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP selama 3 tahun dari tahun 2013 sampai tahun 2015 dan untuk variabel Penagihan Pajak adalah jumlah Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan selama 3 tahun dari tahun 2013 sampai tahun 2015, serta untuk variabel Penerimaan Pajak adalah penerimaan Pajak Orang Pribadi yang diterima selama 3 tahun dari tahun 2013 sampai tahun 2015 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Sumedang pada Kecamatan Buahdua, Cibugel, Cimalaka, Cimanggung, Cisarua, dan Cisitu.

3.4.3 Tempat dan Waktu Penelitian

3.4.3.1 Tempat Penelitian

Tempat penelitian pada kantor pelayanan pajak Sumedang yang beralamat di Jl.Ibrahim Adjie (Jl.Kiara Condong) No 372 Bandung.

3.4.3.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 6 bulan yang dimulai pada bulan Februari sampai dengan bulan Juli 2016.

3.5 Metode Pengujian Data

Alat pengujian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linier Berganda *(Multiple Linear Regression)*.

Menurut Umi Narimawati (2008:5) Analisis Regresi Linier Berganda yaitu "Suatu analisis asosiasi yang digunakan secara bersamaan untuk meneliti pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel tergantung dengan skala interval".

1. Uji Asumsi Klasik

A. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Asumsi normalitas merupakan persyaratan yang sangat penting pada pengujian kebermaknaan (signifikansi) koefisien regresi.

B. Uji Multikolinieritas

"Multikolinieritas adalah untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen". (Husein Umar 2011:177).

C. Uji Heteroskedastisitas

"Heteroskedastisitas adalah dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain". (Husein Umar 2011:179).

D. Uji Autokorelasi

"Autokorelasi adalah dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier terdapat hubungan yang kuat baik positif maupun negatif antar data yang ada pada variabel-variabel penelitian". (Husein Umar 2011:182)

3.6 Metode Analisi Data

1. Penetapan Hipotesis

a. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka dalam penelitian ini penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

a) Hipotesis parsial antara variabel bebas Kepemilikan NPWP terhadap variabel terikat Penerimaan Pajak yang diberikan.

Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan Kepemilikan NPWP terhadap Penerimaan Pajak.

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan Kepemilikan NPWP terhadap Penerimaan Pajak .

b) Hipotesis parsial antara variabel bebas Penagihan Pajak terhadap variabel terikat Penerimaan Pajak.

Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak.

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

b. Hipotesis Statistik

Dalam pengujian hipotesis ini menggunakan uji satu pihak (*one tail test*) dilihat dari bunyi hipotesis statistik yaitu hipotesis nol (H_0) : $\beta = 0$ dan hipotesis alternatifnya (H_1) : $\beta \neq 0$

$H_0 : \beta = 0$: Kepemilikan NPWP tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

$H_1 : \beta \neq 0$: Kepemilikan NPWP berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

$H_0 : \beta = 0$: Penagihan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

$H_1 : \beta \neq 0$: Penagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

c. Menentukan Tingkat Signifikan

Ditentukan dengan 5% dari derajat bebas (dk) = n – k – l, untuk menentukan ttabel sebagai batas daerah penerimaan dan penolakan hipotesis. Tingkat signifikan yang digunakan adalah 0,05 atau 5% karena dinilai cukup untuk mewakili hubungan variabel – variabel yang diteliti dan merupakan tingkat signifikasi yang umum digunakan dalam statu penelitian.

d. Menggambarkan Daerah Penerimaan dan Penolakan

Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis yaitu sebagai berikut:

a) Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ maka H_0 ada di daerah penolakan, berarti Ha diterima artinya antara variabel X dan variabel Y ada pengaruhnya.
b) Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka H_0 ada di daerah penerimaan, berarti Ha ditolak artinya antara variabel X dan variabel Y tidak ada pengaruhnya.

IV. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Analisis Deskriptif

4.1.1.1 Gambaran Kepemilikan NPWP Periode Tahun 2013 – 2015

Kondisi kepemilikan NPWP pada KPP Pratama Sumedang pada tahun 2013-2015 cenderung meningkat dari tahun ke tahun pada rentang waktu 3 tahun. Nilai rata-rata tertinggi terdapat pada tahun 2015 sebesar 8,962, sedangkan nilai rata-rata terendah terdapat pada tahun 2013 sebasar 7,448. Kemudian untuk perkembangan kepemilikan NPWP, perkembangan tertinggih terdapat pada tahun 2014 sebesar 10,4%, dan penurunan terjadi pada tahun 2015 yakni sebesar 8,9%.

4.1.1.2 Gambaran Penagihan Pajak Periode Tahun 2013-2015

Kondisi Penagihan Pajak pada KPP Pratama Sumedang pada tahun 2013-2015 cenderung meningkat dari tahun ke tahun pada rentang waktu 3 tahun. Nilai rata-rata tertinggi terdapat pada tahun 2015 sebesar 831, sedangkan nilai rata-rata terendah terdapat pada tahun 2013 sebasar 68. Kemudian untuk perkembangan Penagihan Pajak, perkembangan tertinggih terdapat pada tahun 2014 sebesar 396,6%,dan penurunan terjadi pada tahun 2015 yakni sebesar 146,3%

4.1.1.3 Gambaran Penerimaan Pajak Periode Tahun 2013-2015

Kondisi Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Sumedang pada tahun 2013-2015 cenderung meningkat dari tahun ke tahun pada rentang waktu 3 tahun. Nilai rata-rata tertinggi terdapat pada tahun 2015 sebesar 37.124.903.628 , sedangkan nilai rata-rata terendah terdapat pada tahun 2013 sebasar 20.252.801.603 . Kemudian untuk perkembangan Penerimaan Pajak, perkembangan tertinggih terdapat pada tahun 2015 sebesar 40,4% dan perkembangan terendah terjadi pada tahun 2014 yakni sebesar 30,5%

4.1.2 Analisi Verifikatif

4.1.2.1 Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Analisis verifikatif digunakan untuk menguji hipotesis berdasarkan hasil perhitungan statistik. Hipotesis konseptual yang diajukan adalah diduga adanya pengaruh dari kepemilikan nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis tersebut adalah regresi linier berganda.

a. Uji Normalitas

Mengaci pada kriteria pengambilan keputusan uji normalitas, diketahui bahwa residu dalam model regresi yang akan dibentuk berdistribusi secara normal dikarenakan hasil pengujian menunjukan nilai signifikansi sebesar 0,972 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian salah satu syarat untuk pengujian regresi telah terpenuhi.

b. Uji Multikolinieritas

Berdasarkan hasil nilai VIF yang telah diuji pakai spss, dapat disimpulkan bahwa model terbebas dari multikolinearitas, dikarenakan kedua variabel bebas memiliki nilai tolerance yang lebih besar dari 0,10 serta nilai VIF kurang dari 10, sehingga asumsi untuk terbebas dari msalah multikolineritas telah terpenuhi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Pada gambar grafik scatterplot di atas, dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang jelas, serta titik menyebar secara acak diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. Hasil tersebut menunjukan bahwa model regresi yang akan dibentuk telah terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Nilai dU yang digunakan sebagai nilai kritis dalam pengujian ini diperoleh dari tabel Durbin Watson dengan jumlah data observasi 36 dan 2 variabel bebas. Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa nilai Durbin Watson yang diperoleh berada diantara nilai dU dan 4-dU. Hasil tersebut menunjukan bahwa model regresi terbebas dari masalah autokorelasi, sehingga model memenuhi salah satu asumsi untuk dilakukan pengujian regresi.

4.1.2.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Persamaan regresi yang menjelaskan dari pengaruh kepemilikan NPWP dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

Y = -0,037 + 0,008 X1 + 0,008 X2

4.1.2.3 Pengaruh kepemilikan NPWP terhadap penerimaan pajak di KPP Sumedang

1. Koefisien Korelasi

dapat dilihat koefisien korelasi (nilai r) yang diperoleh adalah sebesar 0,780 termasuk dalam kategori hubungan yang kuat dikarenakan ada pada interval korelasi antara 0,60-0,799. Koefisien korelasi bertanda positif yang menunjukan hubungan yang terjadi adalah searah, dimana semakin banyaknya kepemilikan NPWP, akan diikuti pula oleh semakin tingginya penerimaan pajak. Dengan demikian dapat disimpulkan adanya hubungan yang kuat antara kepemilikan NPWP dengan penerimaan pajak.

2. Koefisien Determinasi

dapat dilihat bahwa kepemilikan NPWP memberikan kontribusi sebesar 53,1% terhadap penerimaan pajak, sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan orang pribadi (PPh op), Pajak Penghasilan badan (PPh badan), Pajak Pertambahan nilai Barang Mewah (PPnBM) dan faktor-faktor lain.

4.1.2.4 Pengaruh Penagihan Pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Sumedang

1. Koefisien Korelasi

dapat dilihat koefisien korelasi (nilai r) yang diperoleh adalah sebesar 0,524 dan termasuk dalam kategori hubungan yang cukup kuat dikarenakan berada pada interval korelasi antara 0,40-0,599. Koefisien korelasi bertanda positif yang menunjukan hubungan yang terjadi adalah searah, dimana semakin banyaknya KPP melakukan penagihan pajak kepada wajip pajak yang terutang, akan diikuti oleh semakin tingginya penerimaan pajak. Dengan demikian dapat disimpulkan adanya hubungan yang cukup kuat antara penagihan pajak dengan penerimaan pajak.

2. Koefisien Determinasi

dapat dilihat bahwa penagihan pajak memberikan kontribusi sebesar 12,5% terhadap penerimaan pajak. sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan orang pribadi (PPh op), Pajak Penghasilan badan (PPh badan), Pajak Pertambahan nilai Barang Mewah (PPnBM) dan faktor-faktor lain.

4.2 Pembahasan

Setelah dilakukan beberapa pengujian dalam penelitian ini, selanjutnya terdapat beberapa hal yang akan dibahas pada bagian ini mengenai hasil pengujian untuk variabel kepemilikan NPWP terhadap penerimaan pajak.

4.2.1 Analisis Pengaruh kepemilikan NPWP terhadap penerimaan pajak di KPP Sumedang

Dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan nilai korelasi antara kepemilikan NPWP terhadap Penerimaan pajak yaitu sebesar 0,780 yang tergolong dalam kategori hubungan yang kuat dikarenakan ada pada interval korelasi antara 0,60-0,799. Hubungannya menunjukkan arah positif dengan nilai r 0,780 artinya, setiap kenaikan kepemilikan NPWP maka hal tersebut akan meningkatkan penerimaan pajak kondisi ini menunjukkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti telah sesuai dengan teori yang dikatakan oleh Bambang Brodjonegoro (2016 :79), yang menyatakan bahwa Negara dapat mengoptimalisasi penerimaan pajak dengan baik yaitu dengan lebih menekankan kepada masyarakat agar memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan penekanan pada wajib pajak (WP) orang pribadi. Selanjutnya besar persentase pengaruh kepemilikan NPWP terhadap penerimaan pajak yaitu sebesar 53,1%, artinya sebesar 53,1% penerimaan pajak dipengaruhi oleh kepemilikan NPWP, sedangkan sisanya sebesar 46,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan orang pribadi (PPh op), Pajak Penghasilan badan (PPh badan), Pajak Pertambahan nilai Barang Mewah (PPnBM) dan faktor-faktor lain yang memungkinkan adanya terjadi Fenomena.

Hasil penelitian di atas telah menjawab terhadap fenomena yang terjadi, Dimana masih memungkinkan adanya terjadi fenomena ketika kepemilikan NPWP tinggi dan penerimaan pajak rendah. Karena pengaruh kepemilikan NPWP terhadap penerimaan pajak hanya 53,1 % artinya penerimaan pajak tidak 100% dipengaruhi oleh kepemilikan NPWP dan masih ada 46,9% variabel lain yang mempengaruhi penerimaan pajak yang tidak diteliti, jadi ketika fenomena terjadi sangat dimungkinkan karena ada 46,9% variabel lain yang tidak dipengaruhi oleh kepemilikan NPWP yang cukup besar. Adapun fenomena kepemilikan NPWP menurut Direktur Jendral Pajak (Ditjen) Fuad Rachmany (14 Januari 2014) "masih banyak wajib pajak orang pribadi belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sehingga Ditjen pajak kesulitan melacak keberadaan wajib pajak orang pribadi yang di luar karyawan. Dan juga berpengaruh pada potensi penerimaan pajak".

Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Adelina Simanungkalit (2011), Desty Fitria Amanah (2014) sama-sama menyatakan bahwa kepemilikan NPWP memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak. Hasil penelitian ini juga didukung oleh teori yang dijelaskan Bambang Brodjonegoro (2016 :79) bahwa Negara dapat mengoptimalisasi penerimaan dengan baik yaitu dengan lebih menekankan kepada masyarakat agar memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan penekanan pada wajib pajak (WP) orang pribadi. Dan teori dari Agus Setiawan (2007:157) bahwa Pengesahan pemberian NPWP dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar. Surat tersebut menginformasikan pemenuhan kewajiban perpajakan setiap wajib pajak Pengisian kewajiban perpajakan harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga pelaksanaan atas kewajiban perpajakan oleh setiap wajib pajak dapat mengamankan penerimaan pajak. Semakin banyak yang diisi kewajiban perpajakan oleh petugas secara benar dan tepat maka penerimaan pajak dapat meningkat".

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan NPWP berpengaruh terhadap penerimaan pajak dan sebaiknya KPP lebih bekerja keras lagi dalam menjaring wajib pajak yang belom memiliki NPWP dan melakukan sosialisasi dan penyuluhan agar masyarakat sadar bahwa pajak adalah salah satu modal negara dalam menjalankan dan membangun negara ini, sehinggah menjadi negara yang sukses dan maju.

4.2.2 Analisis Pengaruh penagihan pajak Terhadap penerimaan pajak di KPP Sumedang

Dari penelitian yang telah dilakukan didapatkan nilai korelasi antara penagihan pajak terhadap Penerimaan pajak yaitu sebesar 0,524 yang tergolong dalam kategori hubungan yang kuat dikarenakan ada pada interval korelasi antara 0,40-0,599. Hubungannya menunjukkan arah positif dengan nilai r 0,524 artinya, semakin banyaknya penagihan pajak maka hal tersebut akan meningkatkan penerimaan pajak kondisi ini menunjukkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti telah sesuai dengan teori yang dikatakan oleh Waluyo (2009 :238) Penagihan pajak berhubungan terhadap penerimaan pajak yaitu perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukan jumlah yang sangat besar, Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini belum diimbangi dan kegiatan pencairannya, namun dengan

demikian secara umum penerimaan pajak di bidang perpajakan semakin meningkat terhadap tunggakan pajak maka perlu dilaksanakan penagihan. Selanjutnya besar persentase pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak yaitu sebesar 12,5%, artinya sebesar 12,5% penerimaan pajak dipengaruhi oleh penagihan pajak, sedangkan sisanya sebesar 87,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan orang pribadi (PPh op), Pajak Penghasilan badan (PPh badan), Pajak Pertambahan nilai Barang Mewah (PPnBM) dan faktor-faktor lain yang memungkinkan adanya terjadi Fenomena.

Hasil penelitian di atas telah menjawab terhadap fenomena yang terjadi, Dimana masih memungkinkan adanya terjadi fenomena ketika penagihan pajak tinggi dan penerimaan pajak rendah. Karena pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak hanya 12,5% artinya penerimaan pajak tidak 100% dipengaruhi oleh penagihan pajak dan masih ada 87,5% variabel lain yang mempengaruhi penerimaan pajak yang tidak diteliti, jadi ketika fenomena terjadi sangat dimungkinkan karena ada 87,5% variabel lain yang tidak dipengaruhi oleh penagihan pajak yang cukup besar. Adapun fenomena penagihan pajak adalah menurut Surya Arfan (2015) banyaknya wajib pajak yang mempunyai tunggakan tetapi tidak mau membayar utang pajaknya dan tidak memenuhi/mengindahkan surat tagihan pajak (STP) sehingga jumlah yang di tagih tidak sama seperti jumlah yang dilaporkan dan mengakibatkan penerimaan pajak tidak terealisasi atau tidak sesuai target. Dan jelas kita ketahui jika banyaknya tunggakan pajak yang tidak dilunasi maka penerimaan pajak juga akan semakin menurun.

Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Zakiyah M syahahab dan Hantoro Arief (2008), Putu Putra Mahendra (2014) sama-sama menyatakan bahwa penagihan pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak. Hasil penelitian ini juga didukung oleh teori yang dijelaskan Waluyo (2009:238) menyatakan bahwa :Penagihan pajak berhubungan terhadap penerimaan pajak yaitu perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukan jumlah yang sangat besar, Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini belum diimbangi dan kegiatan pencairannya, namun dengan demikian secara umum penerimaan pajak di bidang perpajakan semakin meningkat terhadap tunggakan pajak maka perlu dilaksanakan penagihan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak dan sebaiknya KPP lebih giat lagi dalam melakukan penagihan pajak dan pemeriksaan agar dapat menambah penerimaan pajak dan dapat mencapai target penerimaan pajak tiap tahunnya sehinggah bisa mendorong pembangunan infrastruktur dan fasilitas negara dan dapat memajukan negara.

Dan dapat kita simpulkan juga besar pengaruh kepemilikan NPWP terhadap Penerimaan Pajak yang sebesar 53,1% jauh lebih besar dibandingkan pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak yang sebesar 12,5%. Hal ini disebabkan besarnya potensi kepemilikan NPWP meningkatkankan Penerimaan Pajak yang bisa kita lihat dari besarnya jumlah kepemilikan NPWP pertahun jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah Surat Tagihan Pajak pertahun .

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak Pada KPP Pratama Sumedang Periode 2013-2015, yang artinya setiap penambahan NPWP akan berkontribusi terhadap penambahan penerimaan pajak.
2. Penagihan pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak Pada KPP Pratama Sumedang Periode 2013-2015 . yang artinya Semakin seringnya penagihan pajak yang dilakukan oleh KPP akan berkontribusi terhadap penambahan penerimaan pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, dalam pembahasan yang telah penulis lakukan, maka penulis ingin memberikan saran bagi Kantor Pelayanan Pajak sebagai bahan pertimbangan KPP maupun pihak lainnya mengenai Kepemilikan NPWP, Penagihan Pajak dan Penerimaan Pajak. Berdasarkan kesimpulan diatas penulis ingin mengajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi KPP Pratama Sumedang

Sebaiknya KPP harus lebih semangat dan bekerja keras lagi dalam melakukan penjaringan wajib pajak baru sehinggah akan diikuti pertambahan penerimaan pajak tiap tahunnya dan dapat mencapai target penerimaan pajak yang semakin tahun semakin tinggi dan memberikan dampak yang positif khususnya bagi proses pembangunan Negara.dan juga meningkatkan pemeriksaan terhadap wajib pajak sehinggah dapat diketahui wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak dan dilanjutkan dengan melakukan penagihan pajak sehinggah otomatis dapat meningkatkan penerimaan pajak juga.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Faktor-faktor pengaruh kepemilikan NPWP dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada penelitian ini hanya terbatas pada informasi-informasi internal berdasarkan laporan data KPP. Oleh karena itu, disarankan agar peneliti selanjutnya juga menggunakan informasi internal lainnya dan informasi eksternal yang menyangkut kepemilikan NPWP dan penagihan pajak dan penerimaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Setiawan (2007). *Tax Audit and Tax Review* :PT. Raja Grafindo Persada.

Brodjonegoro, Bambang; dan Jorge Martinez-Vazquez. 2002. An Analysis of Indonesia's Transfer System: Recent Performance and Future Prospects. Working Paper Volume 2, Nomor 13, May 2002. Georgia State University.

Fouktone. 2007 "Optimalisasi Penerimaan Pajak Melalui Pembenahan Sistem Administrasi Pajak".

Haula Rosdiana; dan Edi Slamet Irianto, 2011, Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan Di Indonesia, Visi Media, Jakarta.

Husein, Umar. 2011. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi 11. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Lilis Puspitawati. 2013. Pengaruh Kemampuan Pengguna Informasi Terhadap Sistem Informasi Akuntansi dan Inplikasinya pada Kualitas Informasi. Survei pada KPP Kanwil Jawa Barat 1. Jurnal Riset Akuntansi-Volume VII / No. 1 / April 2015.

Rahayu, Siti Kurnia.2010 "Perpajakan Indonesia (Konsep dan Aspek Sosial)", Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Resmi Siti, 2008. Perjakan Teori dan Kasus Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat.

Suryadi. (2006). Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak. Jurnal Keuangan Publik, 4(1).

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. CV.Alfabeta: Bandung.

Tansuria, Billy Ivan. 2010. Pokok-Pokok Ketentuan Umum Perpajakan, Edisi Pertama, Graha Ilmu: Yoyakarta.

Umi Narimawati. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi. Bandung: Agung Media.

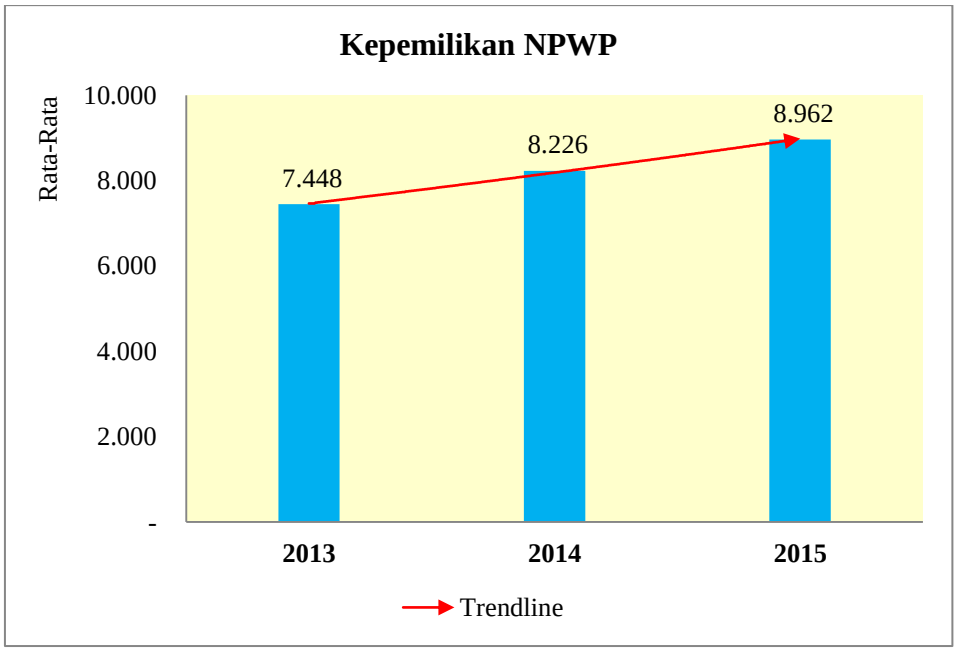
Waluyo .2009. Perpajakan Indonesia 2. Jakarta : Salemba Empat.

LAMPIRAN

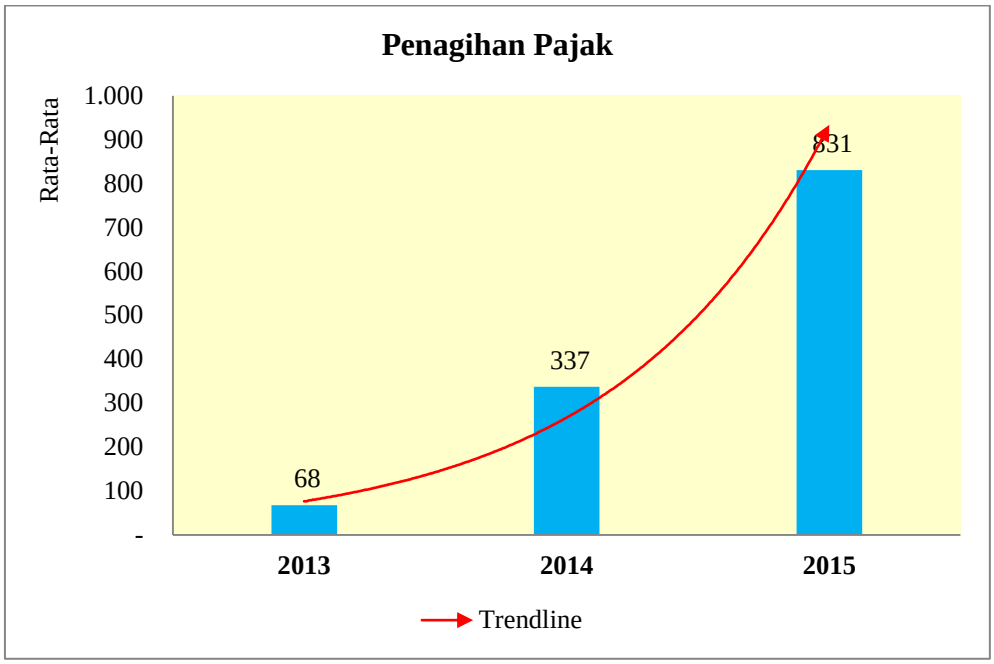
Table 3.2 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep variabel	Indikator	Data
Kepemilikan	"Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor	Jumlah	Rasio

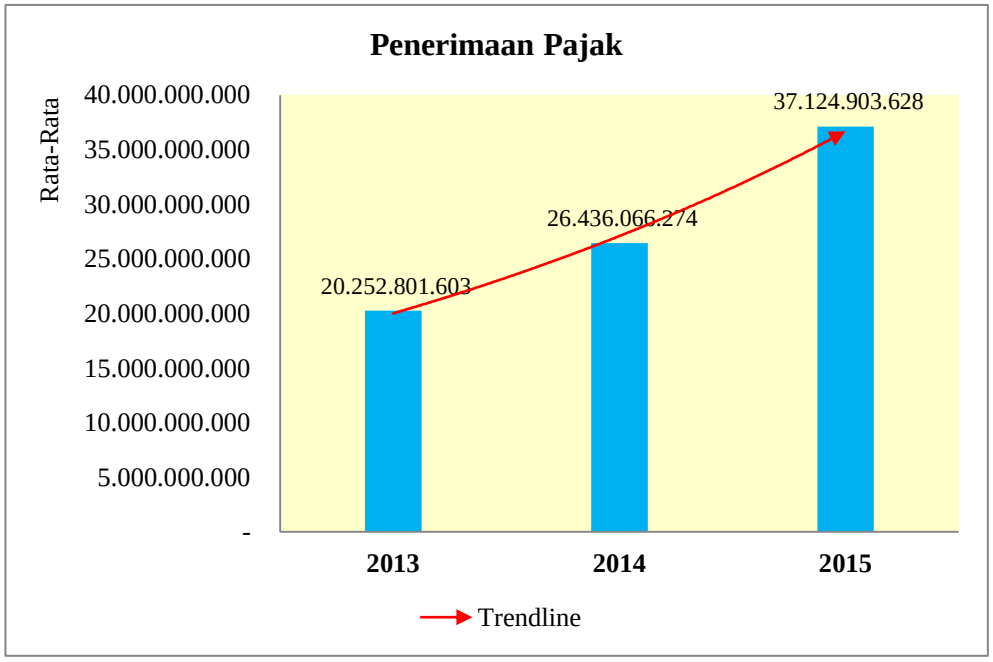
NPWP	yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya" Menurut Mardiasmo (2009:23)	kepemilikan NPWP wajib pajak orang pribadi (Sri Pudyatmoko :2009:132)	
Penagihan Pajak	"Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyandraan, dan menjual barang yang telah disita". Menurut Haularosdiana dan Edi Slamet (2011:245)	Jumlah Surat Tagihan Pajak (STP) (Siti Kurnia Rahayu :2010:186)	Rasio
Penerimaan Pajak	Penerimaan negara dari pajak merupakan salah satu komponenpenting dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan. (H. Simajuntak Timbul dan Mukhlis Imam :2012:30)	Jumlah realisasi penerimaan pajak (Siti Kurnia Rahayu :2010: 27)	Rasio



Gambar 4.1.2
Grafik Perkembangan Kepemilikan NPWP di KPP Pratama Sumedang



Gambar 4.1.4
Grafik Perkembangan Jumlah STP di KPP Pratama Sumedang



Gambar 4.1.6
Grafik Perkembangan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Sumedang

Tabel 4.1.8
Hasil Pengujian Asumsi Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters[a,b]	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,00889182
Most Extreme Differences	Absolute	0,081
	Positive	0,081
	Negative	-0,054
Kolmogorov-Smirnov Z		0,486
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,972

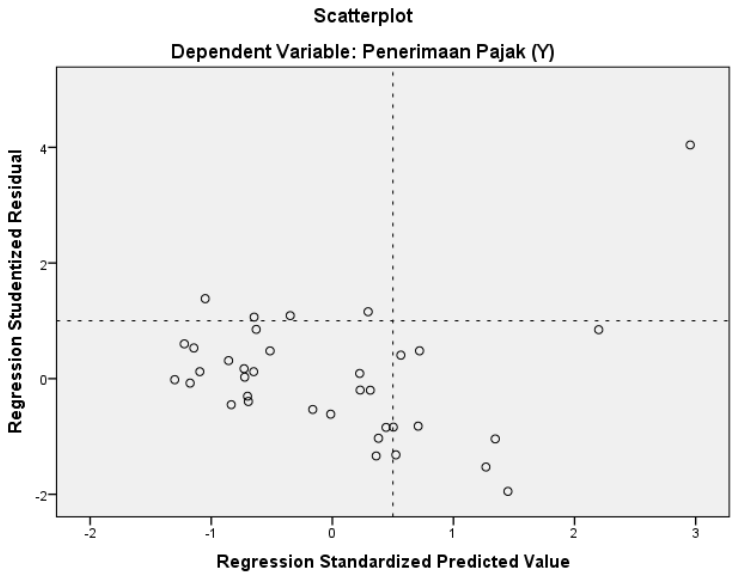
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Tabel 4.1.9
Hasil Pengujian Asumsi Multikolineritas
Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Kepemilikan NPWP (X1)	0,825	1,213
	Penagihan Pajak (X2)	0,825	1,213

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak (Y)



Gambar 4.1.10
Grafik Scatterplot Heteroskedastisitas

Tabel 4.1.11

Hasil Pengujian Asumsi Autokorelasi (Durbin Watson Test)

d_U	Durbin-Watson	4-d_U	Kesimpulan
1,376	1,712	2,624	Tidak Terjadi Autokorelasi

Sumber: data diolah

Tabel 4.1.12
Hasil Estimasi Regresi Linier Berganda
Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations
	B	Std. Error	Beta			Zero-order
1 (Constant)	-0,037	,010		-3,788	0,001	
Kepemilikan NPWP (X1)	0,008	0,001	0,680	6,049	0,000	0,780
Penagihan Pajak (X2)	0,008	0,004	0,239	2,125	0,041	0,524

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak (Y)

Tabel 4.1.13
Koefisien Korelasi
Correlations

		Penerimaan Pajak (Y)
Kepemilikan NPWP (X1)	Pearson Correlation	0,780
	Sig. (2-tailed)	0,000
	N	36

Tabel 4.1.14
Koefisien Determinasi Parsial

Model	Standardized Coefficients	Correlations	Partial Coefficient of Determination
	Beta	**Zero-order**	
1 Kepemilikan NPWP (X1)	0,680	0,780	0,531
Total Effect			**0,531**

Tabel 4.1.15
Koefisien Korelasi
Correlations

		Penerimaan Pajak (Y)
Penagihan Pajak (X2)	Pearson Correlation	0,524
	Sig. (2-tailed)	0,001
	N	36

Tabel 4.1.16
Koefisien Determinasi Parsial

Model	Standardized Coefficients	Correlations	Partial Coefficient of Determination
	Beta	**Zero-order**	
1 Penagihan Pajak (X2)	0,239	0,524	0,125
Total Effect			**0,125**